

POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA DI KOTA PALEMBANG

M. Rayhan Shafaqa

NPP. 32.0220

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0220@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, SH., MH.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Urban air pollution in Palembang has become a pressing environmental issue due to growing industrial activity, vehicular emissions, and weak environmental governance. Although regulations to control pollution are in place, their implementation is often hindered by limited financial resources, institutional fragmentation, and the absence of strong political commitment. These conditions raise critical concerns about the extent of Political Will demonstrated by the Palembang City Government in confronting air quality challenges. Purpose:* This study aims to analyze the Political Will of the Palembang City Government in addressing air pollution, using Brinkerhoff's Political Will framework, and to identify the supporting and inhibiting factors in policy implementation. **Method:** This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, document analysis, and triangulation. **Result:** The findings reveal that although there is formal policy recognition, Political Will is still partial and inconsistent. Initiatives exist but lack sufficient resource allocation, and coordination across institutions remains weak. **Conclusion:** Strengthening Political Will in Palembang requires firm leadership commitment, integration of environmental concerns into development planning, and institutional capacity building to ensure sustainable air quality governance.

Keywords: *Political Will , Air Pollution, Local Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pencemaran udara di Kota Palembang telah menjadi persoalan lingkungan yang semakin mendesak akibat peningkatan aktivitas industri, emisi kendaraan bermotor, serta lemahnya tata kelola lingkungan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi untuk pengendalian pencemaran, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan rendahnya komitmen politik yang konsisten dari pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana *Political Will* yang benar-benar ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam merespons persoalan kualitas udara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara berdasarkan kerangka teori *Political Will* dari Brinkerhoff, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan lingkungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Political Will* pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum konsisten. Terdapat sejumlah inisiatif, namun alokasi sumber daya belum memadai dan

koordinasi antar lembaga masih lemah. **Kesimpulan:** Penguatan *Political Will* di Kota Palembang perlu dilakukan melalui komitmen kepemimpinan yang lebih kuat, integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan pengendalian kualitas udara.

Kata Kunci: *Political Will*, Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran udara merupakan salah satu persoalan lingkungan yang paling mendesak di kota-kota besar, termasuk Kota Palembang. Aktivitas industri, pertumbuhan kendaraan bermotor, dan tata kelola ruang yang belum optimal menyebabkan kualitas udara di kawasan ini terus menurun. Tingginya konsentrasi PM2.5 menjadi indikator utama kerusakan lingkungan dan potensi gangguan kesehatan masyarakat. (Burnett et al., 2018) dalam penelitiannya menyebut bahwa paparan jangka panjang terhadap PM2.5 menyebabkan hampir 9 juta kematian per tahun secara global, menjadikannya sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik. Di Indonesia sendiri, belum semua pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi persoalan ini.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran udara tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut komitmen politik dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. (Post et al., 2010) menjelaskan bahwa *Political Will* merupakan kombinasi dari niat, kapasitas, serta kesediaan kolektif para pengambil kebijakan untuk mendukung dan melaksanakan suatu kebijakan secara konsisten. Dalam konteks pengendalian pencemaran udara, *Political Will* menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif atau hanya menjadi simbolik belaka.

Studi kasus dari China yang dilakukan oleh (Wang et al., 2018) menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian pencemaran udara di wilayah Beijing-Tianjin-Hebei didorong oleh kebijakan terintegrasi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Penurunan signifikan kadar PM2.5 berhasil dicapai melalui regulasi ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengendalian pencemaran udara bukan terletak pada minimnya regulasi, tetapi lebih pada keberanian politik dan kesungguhan dalam implementasi.

Lebih lanjut, (Rashman et al., 2009) menggarisbawahi pentingnya pembelajaran organisasi dan pengetahuan dalam sektor publik, terutama dalam menghadapi isu lingkungan yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah daerah memerlukan kapasitas kelembagaan yang mampu belajar dari pengalaman, beradaptasi terhadap tantangan baru, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Sayangnya, (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015) mengkritik bahwa pendekatan reformasi sektor publik di negara berkembang masih didominasi oleh model NPM yang terlalu teknokratis dan gagal memahami konteks politik lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada realitas sosial-politik daerah.

Dalam konteks Kota Palembang, *Political Will* pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengendalian pencemaran udara. Model *Political Will* yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada kerangka (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015), yang mencakup dimensi inisiatif, alokasi sumber daya, dan keberlanjutan komitmen. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam merespons isu pencemaran, tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari implementasi nyata di lapangan.

Selain itu, (Zhang & Wen, 2008) dalam kajiannya menyoroti bahwa kelembagaan lingkungan di negara berkembang kerap menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan dan lemahnya penegakan hukum. Hal serupa juga tercermin di Kota

Palembang, di mana koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran.

Studi lain dari (Lambelanova et al., 2024) menegaskan bahwa budaya organisasi turut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di level daerah. Komitmen politik seringkali tidak hanya bergantung pada visi kepala daerah, tetapi juga pada bagaimana nilai dan norma organisasi memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, membangun budaya kelembagaan yang responsif terhadap isu lingkungan menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Adapun referensi domestik seperti (Thahir, 2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang yang berpihak pada lingkungan mampu menekan potensi kerusakan ekologis, asalkan didukung oleh regulasi yang jelas dan partisipasi publik yang aktif. Di sisi lain, studi dari (Zhang et al., 2019) dalam konteks Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengendalian udara juga sangat bergantung pada data yang akurat, pemantauan berkala, dan kebijakan berbasis bukti, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya populis tetapi juga efektif. Sebagai tambahan.

Dalam hal ini, temuan penelitian (Artadi, 2023) di Kabupaten Badung turut menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan lingkungan seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat terganggu apabila tidak diiringi koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya tiga dari sembilan indikator keberhasilan kebijakan versi Merilee Grindle yang dapat diimplementasikan dengan cukup baik. Hambatan seperti lemahnya sosialisasi, rendahnya partisipasi perusahaan, dan tumpang tindih wewenang menjadi pelajaran penting dalam menilai bagaimana *political will* beroperasi dalam konteks daerah. Temuan ini menjadi cermin bagi Kota Palembang, di mana keberhasilan penanganan pencemaran udara juga menuntut sinergi lintas sektor dan keselarasan antara kepentingan lingkungan dan pembangunan

(Wibisono & Mawardi, 2021) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun tata kelola kota yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara, tetapi juga penting dalam membenahi tata kelola lingkungan di daerah perkotaan lain seperti Palembang.

Berkaca dari berbagai temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara. Penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan lingkungan, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola kualitas udara di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pencemaran udara di kawasan perkotaan semakin menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk di Kota Palembang. Pertumbuhan kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta lemahnya pengawasan terhadap emisi menjadi kontributor utama memburuknya kualitas udara. Meski berbagai regulasi telah disusun oleh pemerintah pusat dan daerah, efektivitas implementasi di lapangan masih kerap menemui kendala, terutama karena rendahnya komitmen politik dan sinergi antarinstansi. Dalam konteks ini, *Political Will* pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Sayangnya, kajian akademik yang secara spesifik menelaah sejauh mana *Political Will* pemerintah daerah dalam konteks pengendalian polusi udara di tingkat lokal masih sangat terbatas.

Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak membahas isu pencemaran udara dari aspek teknis dan ilmiah, seperti kualitas emisi, dampak kesehatan, atau efisiensi teknologi pengendali polusi. Sementara itu, aspek tata kelola lingkungan dan dinamika kebijakan sering

kali diabaikan, terutama yang menyangkut dimensi *Political Will* sebagai prasyarat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (Post et al., 2010) menekankan bahwa *Political Will* mencakup kapasitas, insentif, dan komitmen aktor kebijakan untuk bertindak. Dalam kasus Palembang, hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji *Political Will* dari dimensi inisiatif kebijakan, alokasi sumber daya, serta keberlanjutan komitmen dalam mengatasi pencemaran udara.

Sebagai perbandingan, studi (Wang et al., 2018) di wilayah Beijing-Tianjin-Hebei menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian polusi udara sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan lintas sektor dan dukungan politik yang kuat. Namun, konteks Indonesia, khususnya di tingkat kota, menghadapi tantangan struktural yang berbeda. (Zhang & Wen, 2008) mengidentifikasi bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di negara berkembang. Ditambah lagi, (Rashman et al., 2009) menggarisbawahi perlunya pembelajaran organisasi dan kapasitas kelembagaan yang adaptif agar kebijakan publik dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kota Palembang, belum ditemukan kajian yang mengukur secara spesifik *Political Will* pemerintah daerah dalam kebijakan pengendalian pencemaran udara menggunakan kerangka sistematis seperti yang dikembangkan oleh (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015). Padahal, model tersebut mampu mengidentifikasi secara jelas sejauh mana keberpihakan dan keseriusan aktor pemerintah dalam menjalankan agenda lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada analisis dimensi-dimensi *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam menangani persoalan pencemaran udara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan lingkungan serta masukan praktis bagi peningkatan komitmen dan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Selain itu, (Wibisono & Mawardi, 2021) menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dan kolaboratif dalam membangun tata kelola perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama melalui sinergi antarpemangku kepentingan yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada analisis dimensi-dimensi *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam menangani persoalan pencemaran udara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan lingkungan serta masukan praktis bagi peningkatan komitmen dan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

(Burnett et al., 2018) dalam artikelnya *Global Estimates of Mortality Associated with Long-Term Exposure to Outdoor Fine Particulate Matter* mengungkapkan bahwa paparan jangka panjang terhadap PM_{2.5} memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan angka kematian global. Dengan pendekatan Global Exposure Mortality Model (GEMM), mereka memprediksi kematian akibat polusi udara bisa mencapai hampir 9 juta jiwa per tahun secara global. Penelitian ini memperkuat urgensi penanganan pencemaran udara sebagai isu kesehatan publik dan menjadi argumen penting dalam menyusun landasan ilmiah skripsi ini.

Selanjutnya, (Post et al., 2010) melalui jurnalnya *Defining Political Will* menyusun definisi konseptual yang sistematis mengenai *Political Will* sebagai niat dan komitmen kolektif para pembuat kebijakan untuk mendukung suatu kebijakan secara aktif. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa *Political Will* harus dilihat dalam kerangka kapasitas, konteks, dan sinyal kebijakan yang terukur. Artikel ini sangat relevan dalam memperkuat fondasi teoritis skripsi, terutama dalam memahami konteks *Political Will* pada isu lingkungan.

Dalam konteks kebijakan lingkungan, (Wang et al., 2018) dalam artikelnya *Taking Action on Air Pollution Control in the BTH Region: Progress, Challenges and Opportunities*

membahas langkah-langkah pengendalian pencemaran udara di wilayah Beijing-Tianjin-Hebei. Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa walau terdapat penurunan signifikan kadar PM2.5, tantangan tetap muncul dalam koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini dapat menjadi perbandingan penting terhadap dinamika kebijakan di Kota Palembang.

(Rashman et al., 2009) dalam kajiannya *Organizational Learning and Knowledge in Public Service Organizations* menekankan pentingnya pembelajaran organisasi dan transfer pengetahuan dalam birokrasi sektor publik. Mereka mengembangkan model dinamis yang mencakup faktor-faktor kontekstual, hubungan antarorganisasi, dan karakteristik organisasi penerima. Kajian ini relevan untuk menekankan perlunya kapasitas kelembagaan dalam mendukung efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara.

(Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015) dalam artikelnya *Public Sector Management Reform in Developing Countries: Perspectives Beyond NPM Orthodoxy* mengkritik pendekatan reformasi berbasis *New Public Management (NPM)* dan menawarkan pendekatan kontekstual berbasis analisis politik dan adaptasi iteratif. Mereka menegaskan pentingnya mengintegrasikan dinamika lokal dalam reformasi kebijakan publik, termasuk pada isu lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai bagian dari kerangka teoritis skripsi ini, (Antlov et al., 2008) telah mengembangkan model *Political Will* dengan dimensi seperti inisiatif, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan komitmen. Kerangka ini digunakan dalam penelitian ini untuk menilai *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam menangani isu pencemaran udara secara komprehensif.

(K. min Zhang & Wen, 2008) dalam ulasannya *Review and Challenges of Policies of Environmental Protection and Sustainable Development in China* menyoroti bahwa kebijakan perlindungan lingkungan di China masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk fragmentasi wewenang dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini memperkaya diskusi dalam skripsi mengenai perbandingan kebijakan makro di negara berkembang.

Di level domestik, (Lambelanova et al., 2024) melalui artikelnya *How Is Political Behavior in Decision-Making? Organizational Culture Perspective in Governance* meneliti perilaku politik dalam pengambilan keputusan di organisasi publik. Ia menyimpulkan bahwa budaya organisasi memainkan peran krusial dalam menentukan derajat komitmen politik terhadap pelaksanaan kebijakan. Temuan ini memperkuat analisis *Political Will* dari sisi internal kelembagaan pemerintah daerah.

Akhirnya, (Wibisono & Mawardi, 2021) dalam artikelnya *Towards Urban Transformation for Sustainability of Ibu Kota Nusantara (IKN)* menjelaskan bagaimana transformasi kota yang berkelanjutan mensyaratkan integrasi antara visi pembangunan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah. Walau fokusnya bukan pada pencemaran udara, artikel ini tetap relevan untuk menunjukkan bagaimana pembangunan berkelanjutan bergantung pada sinergi antara perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan.

(Thahir, 2023) dalam artikelnya *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan tata ruang dapat berkontribusi langsung terhadap pengendalian dampak lingkungan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulasi dan partisipasi masyarakat dalam menekan potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Artikel ini memiliki relevansi tinggi dalam menilai *Political Will* dari sisi pelaksanaan kebijakan teknis di daerah.*

(Q. Zhang et al., 2019) dalam artikelnya *Drivers of Improved PM2.5 Air Quality in China from 2013 to 2017* yang diterbitkan di PNAS menunjukkan bahwa kebijakan penurunan emisi industri dan pengawasan ketat oleh pemerintah pusat Tiongkok berhasil menurunkan kadar PM2.5 secara signifikan. Studi ini memberikan contoh konkret bahwa kombinasi antara

Political Will kuat dan kebijakan berbasis data dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam kualitas udara. Penelitian ini sangat relevan untuk dijadikan pembandingan terhadap kebijakan udara di Indonesia.

(Yuan & Zhang, 2020) dalam jurnal *Journal of Cleaner Production* meneliti keterkaitan antara fleksibilitas kebijakan lingkungan, insentif teknologi, dan keberlanjutan industri di China. Mereka menyimpulkan bahwa regulasi yang adaptif terhadap konteks lokal dapat mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Artikel ini penting sebagai pendukung bahwa *Political Will* harus disertai dengan desain kebijakan yang responsif dan realistis terhadap kebutuhan industri.

(K. min Zhang & Wen, 2008) dalam ulasannya *Review and Challenges of Policies of Environmental Protection and Sustainable Development in China* menyajikan pandangan menyeluruh tentang tantangan dalam menerapkan kebijakan lingkungan di negara berkembang. Ia menyoroti kendala koordinasi antar institusi dan lemahnya penegakan hukum lingkungan sebagai hambatan utama. Walau tidak spesifik membahas pemerintah daerah, artikel ini dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan tentang pentingnya *Political Will* dalam konteks struktur kelembagaan.

(Budd et al., 2009) dalam artikelnya *Of Plagues, Planes and Politics* membahas tantangan pengendalian penyakit menular melalui transportasi udara dan pentingnya regulasi internasional. Meski berfokus pada isu kesehatan global, studi ini menegaskan bahwa penanganan isu lintas batas seperti lingkungan juga sangat bergantung pada *Political Will* dan kapasitas kelembagaan dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis, pendekatan teoritis, serta konteks kebijakan yang diangkat. Sebagian besar studi sebelumnya mengenai pencemaran udara lebih menekankan pada aspek teknis, seperti kualitas udara, dampak kesehatan, dan efektivitas teknologi pengendali emisi. Sementara itu, kajian mengenai dimensi tata kelola dan *Political Will* pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya pencemaran udara, masih sangat terbatas. Beberapa penelitian seperti (Zhang & Wen, 2008) dan (Burnett et al., 2018) mengulas dampak global pencemaran udara dan efektivitas kebijakan nasional, tetapi belum membahas secara mendalam bagaimana komitmen politik di tingkat daerah mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan secara nyata.

Penelitian ini secara khusus menyoroti *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam menangani pencemaran udara, dengan menggunakan kerangka analisis dari Brinkerhoff (2015) yang mencakup dimensi inisiatif kebijakan, alokasi sumber daya, dan keberlanjutan komitmen politik. Kerangka ini belum banyak diterapkan dalam kajian kontekstual di Indonesia, khususnya dalam studi lingkungan perkotaan. Selain itu, pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan aktor-aktor kelembagaan kunci yang terlibat dalam kebijakan lingkungan. Kebaruan juga terletak pada upaya penelitian ini dalam mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi formal dan realisasi implementatif yang mencerminkan tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan pencemaran.

Dengan fokus pada Kota Palembang yang memiliki dinamika pembangunan dan tekanan industri yang tinggi, penelitian ini memberikan kontribusi baru secara konseptual dalam mengembangkan kajian tentang *Political Will* dalam sektor lingkungan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan refleksi kebijakan yang relevan untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara, dengan menelaah secara mendalam dimensi inisiatif kebijakan, alokasi sumber daya, serta keberlanjutan komitmen dalam implementasi kebijakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat komitmen politik daerah dalam mewujudkan kualitas udara yang lebih baik dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual, menyeluruh, dan mendalam berdasarkan perspektif para pelaku kebijakan serta dinamika implementasi yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini berupaya menangkap relasi antara kebijakan, komitmen politik, dan tantangan institusional yang tidak dapat diungkap secara kuantitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada delapan informan yang terdiri dari pejabat struktural di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, anggota DPRD, akademisi lingkungan, serta aktivis masyarakat sipil yang terlibat dalam isu pengendalian pencemaran. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen perencanaan, laporan kinerja, serta kebijakan daerah terkait lingkungan hidup dan kualitas udara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari (Miles, Matthew.B; Huberman, 2002) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setiap informasi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat *Political Will* berdasarkan kerangka teori (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015), yang mencakup indikator inisiatif, alokasi sumber daya, dan keberlanjutan komitmen. Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan data dokumenter guna memperoleh hasil yang konsisten, relevan, dan dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai *Political Will* Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara, penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Political Will* dari Brinkerhoff. Teori ini membagi analisis ke dalam tujuh dimensi utama, yaitu inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan yang baik secara teknis, mobilisasi pemangku kepentingan, komitmen publik dan alokasi sumber daya, sanksi yang kredibel, kontinuitas usaha, serta adaptasi dan pembelajaran. Ketujuh dimensi ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana komitmen politik pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sumber daya, partisipasi multipihak, dan mekanisme pelaksanaan yang konsisten dalam menghadapi permasalahan pencemaran udara di Kota Palembang.

3.1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Palembang dapat dilihat dari adanya kebijakan normatif yang menjadi dasar tindakan kelembagaan. Pemerintah Kota Palembang telah mengadopsi sejumlah regulasi terkait lingkungan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang memuat ketentuan umum mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan adanya Perda

husus yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur tentang pengendalian pencemaran udara sebagai isu utama. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif legislasi dalam menangani persoalan udara masih bersifat parsial dan belum menjadi prioritas utama di tingkat kebijakan lokal.

Meskipun secara regulatif belum optimal, beberapa langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah kota sebagai bentuk respons terhadap peningkatan polusi udara. Salah satu inisiatif yang dapat dicermati adalah penerapan uji emisi kendaraan dinas dan kampanye pengurangan aktivitas pembakaran terbuka. Pemerintah Kota juga pernah menggagas kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam melakukan pemantauan kualitas udara melalui alat Air Quality Monitoring System (AQMS). Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk merespons kondisi riil di lapangan, meskipun pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari program jangka panjang yang terstruktur.

Peran kepala daerah sebagai aktor utama dalam mendorong kebijakan pengendalian pencemaran udara juga menjadi indikator penting dari inisiatif pemerintah. Dalam beberapa pernyataan publik, Wali Kota Palembang menyampaikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, terutama dalam konteks mitigasi perubahan iklim. Namun, keterlibatan langsung kepala daerah dalam kampanye atau aksi publik terkait polusi udara masih terbatas. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa kota lain di Indonesia, di mana kepala daerah aktif mengampanyekan penggunaan transportasi ramah lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam pengendalian polusi. Keterbatasan peran simbolik dan strategis kepala daerah di Palembang dalam isu ini menunjukkan bahwa Political Will belum sepenuhnya termanifestasikan dalam kepemimpinan yang visioner dan konsisten terhadap isu udara bersih.

3.2. Pilihan Kebijakan yang Baik Secara Teknis

Pemilihan kebijakan yang berbasis teknis dan ilmiah merupakan indikator penting untuk menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menangani pencemaran udara secara terukur. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kajian teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, seperti laporan hasil inventarisasi sumber pencemar dan pemantauan kualitas udara ambien. Namun, belum seluruh kebijakan merujuk pada hasil riset atau data ilmiah yang komprehensif. Hal ini menyebabkan munculnya kebijakan sektoral yang bersifat reaktif dan belum mampu menjawab akar permasalahan pencemaran secara sistemik. Ketiadaan pusat data yang terintegrasi juga menjadi kendala dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.

Dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD, penanganan pencemaran udara memang tercantum, namun posisinya tidak menjadi program prioritas utama. Isu lingkungan sering kali masih ditempatkan sebagai pelengkap dari agenda pembangunan ekonomi atau infrastruktur, bukan sebagai agenda strategis yang berdiri sendiri. Hal ini tercermin dari alokasi program yang lebih besar pada proyek fisik dibandingkan pada program preventif atau edukatif terkait kualitas udara. Padahal, menurut (Wang et al., 2018), efektivitas pengendalian polusi di daerah sangat bergantung pada integrasi kebijakan lingkungan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang bersifat lintas sektor.

Lebih lanjut, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan daerah masih belum tampak secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan memberikan toleransi terhadap aktivitas industri yang potensial mencemari udara, dengan dalih investasi dan peningkatan pendapatan daerah. Ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya dijembatani melalui kebijakan teknis yang adil dan berorientasi jangka panjang. Padahal, prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut adanya harmoni antara ketiga aspek tersebut. Minimnya pertimbangan dampak

jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan menunjukkan bahwa Political Will dalam memilih kebijakan yang baik secara teknis masih perlu diperkuat.

3.3. Mobilisasi Pemangku Kepentingan

Pengendalian pencemaran udara di tingkat daerah tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Di Kota Palembang, koordinasi antara eksekutif dan legislatif telah terjalin melalui pembahasan anggaran dan pengesahan program kerja DLH. Namun, bentuk kolaborasi ini masih bersifat prosedural dan belum menunjukkan sinergi substantif dalam merumuskan kebijakan jangka panjang terkait pengendalian pencemaran. Tidak banyak forum kebijakan yang secara khusus membahas isu kualitas udara secara periodik bersama DPRD, sehingga kontrol dan dukungan legislatif terhadap program lingkungan cenderung minim.

Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga masih terbatas. Beberapa LSM lokal memang aktif dalam isu lingkungan, namun partisipasinya dalam proses penyusunan program atau evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran belum terfasilitasi secara optimal oleh pemerintah kota. Dialog publik atau musyawarah terbuka mengenai pencemaran udara jarang dilakukan, padahal pendekatan partisipatif ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya kualitas udara. Ketiadaan forum kolaboratif yang bersifat inklusif mencerminkan masih rendahnya Political Will untuk membangun tata kelola lingkungan yang berbasis multipihak.

Sektor swasta, khususnya pelaku industri, sejauh ini lebih banyak diposisikan sebagai objek pengawasan daripada mitra strategis dalam pengurangan emisi. Padahal, di sejumlah kota lain, insentif berbasis kinerja lingkungan telah mulai diterapkan untuk mendorong pelaku usaha lebih proaktif dalam menekan pencemaran. Di Kota Palembang, belum ada kebijakan yang mendorong partisipasi swasta secara langsung dalam program pengendalian emisi, misalnya melalui CSR tematik lingkungan atau sistem penghargaan berbasis emisi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi aktor non-pemerintah belum menjadi strategi utama dalam kebijakan udara bersih, dan Political Will dalam membangun koalisi multipihak masih memerlukan penguatan.

3.4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen politik pemerintah daerah terhadap isu pencemaran udara dapat ditelusuri melalui pernyataan resmi dan sikap kelembagaan yang ditunjukkan kepada publik. Wali Kota Palembang dan pejabat DLH telah beberapa kali menyampaikan komitmennya dalam menjaga lingkungan hidup melalui berbagai platform, baik dalam forum resmi maupun media massa lokal. Namun, pernyataan tersebut umumnya bersifat normatif dan belum disertai dengan kebijakan konkret yang menunjukkan arah kebijakan jangka panjang. Tidak ada agenda khusus atau instruksi kepala daerah yang secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah strategis dalam menurunkan tingkat polusi udara secara terukur dan berkelanjutan.

Dari sisi anggaran, pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan dana untuk program-program lingkungan hidup, termasuk kegiatan pemantauan kualitas udara dan sosialisasi pengelolaan lingkungan. Namun, anggaran tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil untuk pengendalian pencemaran secara sistemik. Sebagian besar anggaran juga terfokus pada kegiatan administratif dan operasional, bukan pada investasi alat pemantauan, penelitian, atau penguatan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen fiskal terhadap isu pencemaran belum sejalan dengan tingkat urgensinya di lapangan.

Transparansi penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang menunjukkan akuntabilitas dalam komitmen lingkungan. Berdasarkan hasil dokumentasi, belum ditemukan laporan publik yang secara rinci menyajikan realisasi anggaran pengendalian pencemaran

udara. Padahal, akuntabilitas keuangan merupakan indikator penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kurangnya pelaporan terbuka ini menjadi catatan dalam menilai sejauh mana Political Will pemerintah daerah tidak hanya ditunjukkan melalui retorika, tetapi juga melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.

3.5. Sanksi yang Kredibel

Salah satu wujud nyata dari Political Will pemerintah daerah dalam penegakan kebijakan lingkungan adalah keberanian untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara. Di Kota Palembang, terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan, namun dalam praktiknya, penindakan terhadap pelaku pencemaran belum berjalan optimal. Pemerintah daerah cenderung mengambil pendekatan persuasif dan pembinaan terlebih dahulu, yang meskipun penting, tidak selalu memberikan efek jera bagi pelanggar. Lemahnya penegakan sanksi ini menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi indikator lemahnya komitmen politik dalam menjaga kualitas udara.

Penerapan sanksi yang kredibel menuntut keberanian untuk menindak secara adil dan tidak diskriminatif, baik kepada pelaku individu maupun korporasi besar. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terdapat kecenderungan bahwa pelaku usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah mendapatkan perlakuan berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi-politik yang melemahkan integritas kebijakan lingkungan. Padahal, menurut (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015), sanksi yang tegas dan transparan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun trust publik dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah dibuat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kapasitas pengawasan turut memengaruhi efektivitas pemberian sanksi. DLH sebagai instansi teknis tidak memiliki cukup tenaga penyidik lingkungan dan perangkat yang memadai untuk melakukan verifikasi lapangan secara intensif. Akibatnya, pelaporan pelanggaran seringkali tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Dalam konteks ini, Political Will yang kuat seharusnya diwujudkan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan komitmen untuk menegakkan hukum lingkungan secara adil dan konsisten, bukan hanya sebatas wacana atau instruksi administratif.

3.6. Kontinuitas Usaha

Keberlanjutan dalam upaya pengendalian pencemaran udara menjadi cerminan dari konsistensi Political Will yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Di Kota Palembang, sejumlah program seperti pemantauan kualitas udara dan edukasi lingkungan telah dilaksanakan, namun keberlanjutannya masih belum terjamin. Beberapa program terhenti di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan atau pergantian prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa agenda pengendalian pencemaran udara belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, melainkan masih bergantung pada kehendak aktor politik tertentu.

Minimnya pembaruan dan evaluasi berkala terhadap program pengendalian pencemaran juga menjadi catatan penting. Berdasarkan penelusuran dokumen dan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya mekanisme evaluasi tahunan atau pelaporan publik yang mengulas capaian pengurangan emisi atau peningkatan kualitas udara. Tanpa evaluasi, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan kebijakan. Menurut (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015), kontinuitas dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus kebijakan yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pergantian kepala daerah kerap membawa perubahan orientasi kebijakan, termasuk dalam isu lingkungan. Di beberapa periode, isu pencemaran udara bahkan tidak

menjadi agenda prioritas dan hanya muncul dalam bentuk kampanye seremonial. Kurangnya komitmen lintas kepemimpinan ini menunjukkan bahwa Political Will terhadap isu lingkungan masih lemah dan belum tertanam secara struktural dalam birokrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kelembagaan yang mampu menjaga kesinambungan program, terlepas dari dinamika politik elektoral yang terjadi.

3.7. Adaptasi dan Pembelajaran

Kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan pembelajaran kelembagaan merupakan indikator penting dari keberlanjutan Political Will dalam penanganan pencemaran udara. Di Kota Palembang, upaya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengendalian polusi udara masih belum menjadi agenda rutin. Evaluasi kebijakan biasanya hanya dilakukan dalam bentuk laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban, tanpa disertai analisis mendalam terhadap dampak lingkungan secara spesifik. Padahal, dinamika pencemaran udara yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan sosial memerlukan pembaruan strategi secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan.

Salah satu bentuk adaptasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengadopsi praktik baik (*best practices*) dari daerah lain yang telah berhasil dalam menurunkan tingkat pencemaran. Namun, dari hasil wawancara dan telaah dokumen, belum ditemukan adanya inisiatif konkret dari Pemerintah Kota Palembang untuk mempelajari atau mereplikasi program lingkungan dari daerah lain. Kecenderungan untuk bekerja secara sektoral dan minimnya jejaring antar daerah menjadi penghambat dalam proses pembelajaran kelembagaan. Menurut (Rashman et al., 2009), pembelajaran antarorganisasi dan adaptasi inovasi merupakan elemen penting dalam penguatan tata kelola sektor publik yang dinamis.

Fleksibilitas dalam penyesuaian strategi dan keterbukaan terhadap inovasi juga belum tampak secara signifikan dalam kebijakan pengendalian pencemaran udara di Palembang. DLH dan OPD terkait masih cenderung mengikuti prosedur rutin yang sudah ada, tanpa mengevaluasi kemungkinan pendekatan baru yang lebih efektif. Pemerintah juga belum menyediakan ruang khusus untuk mendorong inovasi, misalnya melalui kolaborasi dengan akademisi atau sektor swasta dalam pengembangan teknologi pengendali emisi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran terhadap isu lingkungan, proses pembelajaran institusional belum menjadi bagian dari budaya birokrasi. Dengan demikian, Political Will yang adaptif dan berbasis pembelajaran masih perlu dikembangkan agar kebijakan lingkungan di tingkat daerah tidak stagnan dan mampu menjawab tantangan jangka panjang secara progresif.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Political Will Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara tercermin melalui sejumlah indikator, mulai dari adanya kebijakan sektoral, pernyataan komitmen, hingga pelaksanaan program pemantauan kualitas udara. Namun, Political Will tersebut masih belum terwujud secara menyeluruh dan konsisten, baik dalam aspek inisiatif kebijakan, alokasi sumber daya, maupun keberlanjutan program. Temuan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu pencemaran udara memang ada, namun belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Jika dikaitkan dengan teori Political Will dari Brinkerhoff, maka Pemerintah Kota Palembang menunjukkan Political Will yang parsial dan inkonsisten. Pada dimensi inisiatif, terdapat langkah-langkah yang merefleksikan kepedulian terhadap isu lingkungan, namun belum dibarengi dengan peraturan daerah yang kuat atau keterlibatan aktif kepala daerah dalam kampanye pengendalian polusi udara. Dari sisi komitmen anggaran dan mobilisasi pemangku kepentingan, masih terdapat kesenjangan antara retorika kebijakan dengan implementasi di

lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Political Will belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dan masih sangat bergantung pada inisiatif individu atau unit tertentu dalam pemerintahan.

Temuan ini selaras dengan pendapat Zhang & Wen (2008), yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya sumber daya merupakan tantangan utama dalam penanganan pencemaran di negara berkembang. Di Kota Palembang, kondisi ini tercermin pada minimnya keterlibatan sektor swasta, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi penggunaan anggaran lingkungan. Seperti dikemukakan oleh Rashman et al. (2009), kelembagaan sektor publik yang tidak adaptif akan sulit membangun sistem kebijakan yang responsif terhadap isu-isu kompleks seperti pencemaran udara.

Selain itu, kontinuitas usaha dalam pengendalian polusi udara di Palembang belum sepenuhnya terjamin. Program lingkungan cenderung berubah-ubah mengikuti kepemimpinan politik, tanpa adanya evaluasi kebijakan secara berkala atau mekanisme pembelajaran institusional. Padahal, menurut Brinkerhoff & Brinkerhoff (2015), keberlanjutan dan evaluasi merupakan elemen penting dalam membangun Political Will yang kuat dan berbasis sistem. Minimnya adopsi praktik baik dari daerah lain dan belum optimalnya ruang inovasi juga memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas isu pencemaran udara secara jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Political Will Pemerintah Kota Palembang masih berada pada tahap deklaratif dan belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi aksi kebijakan yang kuat, konsisten, dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka kelembagaan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas organisasi teknis seperti DLH, serta penyusunan strategi lintas sektor yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas akademik. Hanya dengan komitmen politik yang menyeluruh dan sistemik, upaya pengendalian pencemaran udara dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat kota.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Political Will Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pencemaran udara masih berada pada level normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Melalui analisis tujuh dimensi dari Brinkerhoff, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat inisiatif kebijakan dan program lingkungan hidup, komitmen tersebut belum didukung oleh regulasi yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta keterlibatan multipihak yang signifikan. Political Will pemerintah daerah tampak dari adanya program pemantauan kualitas udara dan kampanye persuasif, namun belum sepenuhnya menunjukkan arah kebijakan yang sistematis dan berdampak langsung terhadap penurunan pencemaran.

Pada aspek komitmen publik dan alokasi sumber daya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lingkungan, tetapi belum proporsional dengan urgensi persoalan pencemaran udara. Selain itu, pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencemaran belum dilaksanakan secara konsisten dan kredibel. Minimnya keberlanjutan program dan belum adanya evaluasi kebijakan yang sistematis menunjukkan bahwa kontinuitas dan adaptasi kelembagaan masih menjadi tantangan. Upaya pembelajaran serta adopsi inovasi dari daerah lain juga belum menjadi bagian dari strategi lingkungan Kota Palembang.

Dengan demikian, Political Will Pemerintah Kota Palembang masih perlu diperkuat melalui penataan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas teknis dan anggaran, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan kolaborasi dengan masyarakat sipil serta sektor swasta. Upaya ini akan lebih efektif jika dilandasi oleh kepemimpinan yang visioner dan komitmen berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menanggulangi pencemaran udara sebagai isu strategis pembangunan kota.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada Kota Palembang, sehingga belum memungkinkan untuk melihat variasi Political Will di daerah lain yang memiliki karakteristik lingkungan dan tata kelola berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas serta kondisi birokratis yang membatasi akses terhadap dokumen internal menjadikan sebagian data diperoleh melalui pendekatan triangulasi dan interpretasi naratif. Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif kelembagaan, sehingga belum menggali secara mendalam persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan melakukan studi perbandingan antar daerah, khususnya kota-kota besar yang juga menghadapi tekanan polusi udara tinggi. Pendekatan campuran (*mixed-method*) juga dapat diterapkan untuk menggali baik dimensi kebijakan maupun respons publik terhadap pelaksanaan program lingkungan. Selain itu, kajian mendalam terkait efektivitas regulasi dan evaluasi penerapan sanksi lingkungan perlu dikembangkan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif. Studi longitudinal juga diperlukan untuk menilai keberlanjutan Political Will pemerintah daerah pascapergantian kepemimpinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada para informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, akademisi, serta tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan pandangan yang sangat berharga. Penghargaan dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti sepanjang proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola lingkungan di daerah serta mendorong Political Will yang lebih kuat dalam mewujudkan udara bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Palembang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2008). Civil society organizations and democratic reform: progress, capacities, and challenges in Indonesia. *37th Annual Conference: Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action*, 1–24. http://www.rti.org/pubs/Antlov_CSOs_in_Indo_ARNOVA.pdf
- Artadi, I. P. H. S. (2023). Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 08(01), 12–28. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3032> <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3032>**
- Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2015). Public Sector Management Reform in Developing Countries: Perspectives Beyond NPM Orthodoxy. *Public Administration and Development*, 35(4), 222–237. <https://doi.org/10.1002/pad.1739>
- Budd, L., Morag Bell, & Brown, T. (2009). Of plagues, planes and politics: Controlling the global spread of infectious diseases by air. *Political Geography*, 28(7), 426–435. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.10.006>
- Burnett, R., Chen, H., Szyszkowicz, M., Fann, N., Hubbell, B., Pope, C. A., Apte, J. S., Brauer, M., Cohen, A., Weichenthal, S., Coggins, J., Di, Q., Brunekreef, B., Frostad, J., Lim, S.

- S., Kan, H., Walker, K. D., Thurston, G. D., Hayes, R. B., ... Spadaro, J. V. (2018). Global estimates of mortality associated with longterm exposure to outdoor fine particulate matter. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(38), 9592–9597. <https://doi.org/10.1073/pnas.1803222115>
- Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How Is Political Behavior In Decision-Making? Organizational Culture Perspective In Governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(1), 13–31. <https://doi.org/Doi:https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4335>**
- Miles, Matthew.B; Huberman, A. M. (2002). The Qualitative Researcher ' s Companion Understanding and Validity in Qualitative Research. In *The Qualitative Researcher's Companion*.
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics and Policy*, 38(4), 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>
- Rashman, L., Withers, E., & Hartley, J. (2009). Organizational learning and knowledge in public service organizations: A systematic review of the literature. *International Journal of Management Reviews*, 11(4), 463–494. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00257.x>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Thahir, B. (2023). Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>**
- Wang, L., Zhang, F., Pilot, E., Yu, J., Nie, C., Holdaway, J., Yang, L., Li, Y., Wang, W., Vardoulakis, S., & Krafft, T. (2018). Taking action on air pollution control in the Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) region: Progress, challenges and opportunities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph15020306>
- Wibisono, R. B., & Mawardi, R. A. (2021). TOWARDS URBAN TRANSFORMATION FOR SUSTAINABILITY OF IBU KOTA NUSANTARA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16(1).
- Yuan, B., & Zhang, Y. (2020). Flexible environmental policy, technological innovation and sustainable development of China's industry: The moderating effect of environment regulatory enforcement. *Journal of Cleaner Production*, 243, 118543. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118543>
- Zhang, K. min, & Wen, Z. guo. (2008). Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China. *Journal of Environmental Management*, 88(4), 1249–1261. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.019>
- Zhang, Q., Zheng, Y., Tong, D., Shao, M., Wang, S., Zhang, Y., Xu, X., Wang, J., He, H., Liu, W., Ding, Y., Lei, Y., Li, J., Wang, Z., Zhang, X., Wang, Y., Cheng, J., Liu, Y., Shi, Q., ... Hao, J. (2019). Drivers of improved PM2.5 air quality in China from 2013 to 2017. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(49), 24463–24469. <https://doi.org/10.1073/pnas.1907956116>